

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Qomaruddin Munir, Evrita Lusiana Utari. (2016). Pemanfaatan E-KTP untuk Proses Pemungutan Suara Pemilihan Umum Di Indonesia Menggunakan Sistem E-Vote. *Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Multimedia*. Yogyakarta: STMIK AMIKOM Yogyakarta.
- Andriadi, F. (2017). *Partisipasi Politik Virtual*. Jakarta: RMBOOKS.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Caarls, S. (2010). *E-Voting Handbook: Key Steps in the Implementation of E-enabled Elections*. France: Council of Europe.
- Cahyono, H. (2012). Arah Perkembangan Demokrasi di Perdesaan Pasca Orde Baru. *Jurnal Masyarakat Indonesia* .
- Darmawan Ikhsan, dkk. (2014). *Memahami E-Voting: Berkaca dari pengalaman negara-negara lain dan Jembrana (Bali)*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI bekerja sama dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- IDEA, I. (2011). *Memperkenalkan Pemilihan Electronic: Pertimbangan Esensial*. Australia: Program Asia dan Pasifik International IDEA.
- Loura Hardjaloka, Varida Megawati Simarmata. (2011). E-Voting: Kebutuhan vs Kesiapan (Menyongsong) E-Demokrasi. *Jurnal Konstitusi* .

Mantra, I. B. (2004). *Filsafat Penulisan & Metode Penulisan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Maschab, M. (2013). *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*. Yogyakarta: Research Centre for Politics and Government FISIPOL UGM.

Muis, A. (2006). Pemilihan Kepala Desa sebagai Acuan Empiris Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Secara Langsung (Ditinjau dari Perspektif Historis). *Jurnal Desentralisasi*.

Nugrahani, F. (2011). *Metode Penulisan Kualitatif dalam Penulisan Pendidikan Bahasa*. Surakarta.

Nugroho, R. (2018). *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Raco, J. *Metode Penulisan Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulan*. Jakarta: PT. Gasindo.

Shelvie Nidya Neyman, Muhammad Fikri Isnaini, Sri Nurdiati. (2013). Penerapan Sistem E-voting pada Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. *Jurnal Sains Terapan*.

Somantri, G. R. (2005). Memahami Metode Kualitatif. *Jurnal Makara Sosial Humaniora*.

Latief, M. Syahbudin. (2003). Kendala dan Prospek Demokratisasi Desa pada Era Otonomi Daerah. *Populasi, Jurnal Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada Vol 4 No 2*.

Sumber Berita

<https://www.liputan6.com/regional/read/3637633/pilkades-e-voting-pemalang-berujung-demo-besar-ada-yang-curang> diakses pada Agustus 2019

<http://www.dprd-pemalangkab.go.id/2078/audiensi-pelaksanaan-pilkades-e-voting/> diakses pada Agustus 2019

<https://tirto.id/plus-minus-e-voting-untuk-pilkada-indonesia-bNoN>. Diakses pada tanggal 30 September 2019.

<https://nasional.kompas.com/read/2014/11/17/1855374/Maju-Mundur.E-voting.?page=all>. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2019.

<https://www.solopos.com/5-desajadi-contoh-pilkades-e-voting-pemkab-boyolali-bentuk-tim-teknis-351733>. diakses pada 9 Mei 2020.

<http://dispermasdes.pemalangkab.go.id/>. Diakses 13 maret 2020

<https://nasional.sindonews.com/berita/930612/18/menyoal-e-voting?showpage=all>. Diakses pada 22 Januari 2021.

<https://www.dw.com/id/e-voting-salah-satu-solusi-pelaksanaan-pemilu-di-masa-mendatang/a-48633359>. Diakses pada 1 Maret 2021.

<https://nasional.kompas.com/read/2019/04/04/20132701/makna-pemilu-dari-4-aspek-sebagai-tolok-ukur-hingga-alat-pendidikan>. Diakses pada 1 Maret 2021.

Peraturan

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Undang-Undang No 19 tahun 1965 tentang Desapraja sebagai Bentuk Peralihan untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Undang-Undang No 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.